

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Yohanes Rhama J. K. Ohoiwutun ¹, Caecilia Henny Setya Wati ²

^{1 2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus.

e-mail korespondensi: Caecilia Henny Setya Wati (caecilia@unmus.ac.id)

Abstrak, Tujuan studi untuk menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 responden pegawai bidang keuangan dan asset yang berada di SKPD Kabupaten Merauke. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil Regresi menunjukkan kapasitas sumber daya manusia tidak mendukung pengelolaan keuangan daerah. Sementara Penggunaan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah mendukung pengelolaan keuangan daerah. Dilain pihak, ketiga varaibel eksogen secara simultan mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan

***Abstract,** The purpose of this study is to examine the effect of human resource capacity, utilization of information technology and government internal control systems on the quality of financial reports. The population in this study were 50 respondents in the financial and asset sector who were in the SKPD of Merauke Regency. The data analysis technique used multiple linear regression analysis. Regression results show that human resource capacity does not support local financial management. Meanwhile, the use of information technology and the implementation of the government's internal control system supports regional financial management. On the other hand, the three exogenous variables simultaneously support the quality of regional financial management.*

***Keywords:** Human Resource Capacity, Utilization of Information Technology, Government Internal Control System, and Quality of Financial Reports*

1. Pendahuluan

Akuntansi Sektor Publik (ASP) yang berkembang di Indonesia dengan pesati, membuat kebutuhan akan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah atas kinerjanya kepada masyarakat dan menjadi sesuatu tuntutan umum untuk dilaporkan (Lauma dkk, 2015). Pada era turbulensi ini pelaporan keuangan daerah dituntut untuk mencerminkan keadaan sesungguhnya yang terjadi dilapangan. Di lain pihak, masyarakat mengharuskan entitas pemerintah daerah dapat menyediakan informasi keuangan yang reliabel kepada masyarakat.

Penyajian informasi keuangan bagi entitas pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi akuntansi yang disajikan dapat memenuhi kriteria kualitatif laporan keuangan antara lain relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penyajian informasi keuangan yang berkualitas dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang memadai (Yosefrinaldi, 2013). Kapasitas sumber daya manusia yang memadai, bertugas menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dengan menerapkan sistem dan memahami seni akuntansi dengan baik (Hullah, 2017).

Praktik penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sangat memerlukan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan daerah. PP No. 56 Tahun 2005 mewajibkan setiap entitas pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna mendorong terciptanya kualitas manajemen keuangan daerah, dan mendistribusikan outputnya kepada pihak-pihak berkepentingan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dengan tepat.

Sistem pengendalian intern yang optimal dapat meminimalisir kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak, dan akan segera dapat diketahui dan diatasi (Purwono, 2004). Proses pengendalian intern akuntansi diselenggarakan untuk memenuhi harapan berbagai pihak mengenai keakuratan penyajian laporan keuangan.

Fenomena yang ditemukan pada Kabupaten Merauke bahwa Aparatur Sipil Negara perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia sesuai arahan dari wakil kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, dalam sosialisasi yang dilaksanakan pada kantor Bupati Merauke, agar pegawai mampu mempercepat proses pelayanan prima kepada publik (Redaktur, 2020). Selain itu terdapat fenomena tentang pemanfaat teknologi yang sudah memiliki kualitas yang mendukung dan memadai, namun dalam penggunaannya belum semua pegawai mampu mengoprasikannya dengan baik sehingga sering menjadi penghambat dalam bekerja (Redaktur, 2020).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif. Sampel data adalah pegawai bagian pengelola keuangan dan asset dari 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Merauke. Kriteria yang dijadikan acuan yaitu pegawai yang melaksanakan pengelolaan pada bidang keuangan dan aset yang bekerja minimal 1 tahun. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data tabel satu, nilai minimal dari variabel kualitas laporan keuangan sebesar 34.00, nilai maks 55.00 kemudian rata-rata total jawaban responden 46.40 dan standar deviasi 4.97. Konstruksi kapasitas sumber daya manusia nilai min 15.00, nilai maks 35.00 kemudian rata-rata total jawaban responden 26.26 dan standar deviasi 4.34. Selanjutnya variabel independen Pemanfaatan Teknologi Informasi nilai min sebesar 10.00, nilai maks 25.00 kemudian nilai rata-rata jawaban responden 21.24 dan standar deviasi 2.59. Variabel independen SPIP nilai min sebesar 28.00, nilai maks 50.00 kemudian nilai rata-rata jawaban responden 41.10 dan standar deviasi 4.23.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Sampel	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	Standar Deviasi
Y	50	34,00	55,00	46,4000	4,97340
X1	50	15,00	35,00	26,2600	4,34159
X2	50	10,00	25,00	21,2400	2,59953
X3	50	28,00	50,00	41,1000	4,23903
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Hasil Data Olahan

Hasil uji regresi berganda sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2. Hasil pengujian hipotesis pertama mendapatkan tingkat signifikansi 0.976 dengan nilai t hitung sebesar 0.030, maka H_1 ditolak artinya kapasitas sumber daya manusia tidak maksimal dalam pengelolaan keuangan. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil temuan Zuliarti (2012), yaitu Kapasitas sumber daya manusia berhubungan dengan efektif dan efisien menjalankan fungsi dan kekuasaannya untuk mencapai tujuannya. Kapasitas sumber daya manusia setiap SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten Merauke perlu dikelola agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola keuangan.

Tabel 2. Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,918	5,676		2,100	0,041
	SUM_X1	0,004	0,133	0,003	0,030	0,976
	SUM_X2	0,566	0,255	0,296	2,219	0,031
	SUM_X3	0,544	0,159	0,463	3,422	0,001
a. Dependent Variable: SUM_Y						

Sumber: Hasil Data Olahan

Berdasarkan hasil regresi , persamaan regresi berganda:

$$Y = 11,918 + 0,004 x_1 + 0,566x_2 + 0,544x_3 + e$$

Ketidaksignifikan dari hasil ini lebih disebabkan karena variasi responden dalam menjawab diindikator yang ada pada variabel kapasitas sumber daya manusia. Akan tetapi, berdasarkan gambaran yang ada di lapangan, laporan keuangan yang dihasilkan tetap berkualitas karena setiap SKPD telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang memandatkan setiap entitas pemerintah daerah dapat memberdayakan pegawai bagian akuntansi dan laporan keuangan.

Hasil regresi yang ke kedua menunjukkan dampak yang signifikan antara variabel ekogen dan endogen. Artinya mengadopsi teknologi informasi menjadi salah satu kriteria penting dalam upaya pengelolaan keuangan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian yang dilaksanakan Zuliarti (2012), Yosefrinaldi (2013), Ariesta (2013), Siti Soimah (2014) dan Winda Indriani (2016). Pemanfaatan teknologi informasi, mampu mengolah, menyimpan informasi, dan menyebarkan informasi. Hasil penelitian ini didukung dengan data. Rata-rata responden mengatakan setuju dengan pemanfaatan teknologi dapat mempermudah pekerjaannya. Karena sering menggunakan komputer saat mengerjakan tugas, dan terkadang menggunakan internet sebagai *contact person* untuk mengirim pesan atau file dokumen. Artinya, teknologi informasi dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah.

Hasil regresi ketiga menunjukkan hasilnya signifikan pada alpha 0,05. Hal ini menandakan bahwa SPIP berkontribusi dan mendukung terciptanya kualitas pengelolaan keuangan. Hasil regresi ini memperkuat hasil penelitian Yosefrinaldi (2013), Siti Soimah (2014) dan Winda Indriani (2016). SPIP dapat memberikan jaminan yang memadai bagi efektivitas dan efisiensi keandalan pengelolaan keuangan (Siti Soimah, 2014). Sistem pengendalian dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan alat koordinasi yang efektif dalam pengelolaan. Hal didukung pendapat Mulyadi (2014), bahwa sistem pengendalian *intern* menjadi alat koordinasi yang efektif dalam pengelolaan keuangan.

Hasil Regresi simultan menunjukkan tiga variabel eksogen dapat mempengaruhi variabel endogen. Hasil regresi ini memperkuat temuan Siti Soimah (2014) dan Winda Indriani (2016). Seseorang dengan kemampuan yang baik akan mampu melaksanakan semua tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai arahan dan waktu yang ditentukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel eksogen secara bersamaan berkontribusi terhadap variabel endogen.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan kapasitas sumber daya manusia tidak mendukung pengelolaan keuangan daerah. Sementara Penggunaan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah mendukung pengelolaan laporan keuangan. Dilain pihak, ketiga variabel eksogen secara simultan mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah.

5. Daftar Pustaka

- Ariesta. 2013. Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Pasaman Barat).
- Hullah A. R. dan Pontoh W., 2017. Analisis Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal volume 06, 65-71
- Lauma B. E, Morasa J., dan Kalangi L., 2015, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Aset Tetap Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow, Jurnal Akuntansi, 84-97
- Purwono, Edi. 2004. Aspek-aspek EDP Audit Pengendalian Internal pada Komputerisasi. Yogyakarta: Andi
- Redaktur (2020). Kepala BKN Papua : Merauke jadi Proyek Percontohan SDM Aparatur Sipil Negara di Selatan Papua. Dikutip 20 Juni 2021 dari Legion news. <https://legion-news.com/kepala-bkn-papua-meraukejadi-projek-percontohan-sdm-aparatur-sipil-negara-di-selatan-papua/>
- Siti, Soimah. 2014. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara.
- Winda, Indriani. 2016. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota bengkulu.
- Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel internvening sistem pengendalian intern pemerintahan (studi emperis pada dinas keuangan dan aset daerah se-sumatera barat).
- Zuliarti. 2012. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintahan daerah (studi pada pemerintah kabupaten kudus).